

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keraf (2010, hlm. 116) menyebutkan bahwa kehidupan umat manusia menjadi semakin kompleks, sebagai akibat dari (1) meningkatnya pertumbuhan penduduk global yang melampaui kekuatan produktivitas alami bumi dan (2) cepatnya perkembangan komunikasi dan transportasi, yang mengakibatkan “*world interlinkages*” seperti globalisasi ekonomi, jual beli, krisis lingkungan, permasalahan pembangunan, kemiskinan serta isu-isu lainnya. Bencana lingkungan adalah salah satu konsekuensi dari “*world interlinkages*”. Masalah lingkungan yang dirasakan oleh manusia berakar pada perilaku buruk manusia itu sendiri, perilaku buruk tersebut muncul dari perspektif manusia yang salah tentang dirinya, alam, dan interaksi antara manusia dengan alam semesta.

Perkembangan Kota Bandung terjadi seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, banyak didorong oleh penambahan penduduk (manusia) akibat urbanisasi, terlebih para pendatang yang akhirnya menetap. Laju pembangunan juga yang menyebabkan kota berkembang secara tidak terarah (*urban sprawl*). Memburuknya sanitasi lingkungan, penurunan mutu air permukaan dan udara di kota, serta penurunan laju produksi air tanah di wilayah cekungan Bandung semuanya berdampak pada keadaan biofisik lingkungan yang “tertekan”.

Permasalahan mengenai sampah bukanlah suatu hal yang tabu dikalangan masyarakat, permasalahan ini merupakan permasalahan yang juga seperti sisi lain di kehidupan masyarakat dan sampah hadir sebagai suatu konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini, namun kadang sulit bagi kita untuk dapat merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah alam berdasarkan keinginan mereka. Alam, di sisi lain, tidak memiliki tujuan atau kapasitas eksploitatif aktif bagi manusia. Namun secara langsung ataupun tidak langsung alam akan memberikan

dampak untuk keberlangsungan makhluk. Kesehatan dan bahkan keselamatan manusia akan mendapat manfaat dari lingkungan yang indah dan berkelanjutan. Tingkah laku manusia terhadap lingkungan dapat terlihat dengan jelas ketika masih belum ada peradaban manusia, pada peradaban awal, hingga saat ini, ketika peradaban telah berkembang menjadi keadaan kontemporer dan semakin kompleks, ilmu pengetahuan dan teknologipun menyertai lajunya peradaban. Anehnya, perilaku manusia akan lingkungan tidak membaik, tetapi sebaliknya.

Berdasarkan data dari *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah*. Pada tahun 2018, *volume* sampah di kota Bandung sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Hanya 1120,00 ton/hari dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota saat ini sebanyak 2490622 yang dapat dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan selebihnya tertinggal di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan berserakan di kota dan sungai, khususnya di Bandung. Selain data tersebut, penulis juga menndapatkan data presentase komposisi sampah di kota Bandung periode 2017-2018.



Gambar 1. 1 presentase komposisi sampah di kota Bandung periode 2017-2018

Sumber: (diakses *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah*, 2020)

Proses pelibatan masyarakat menjadi tolak ukur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di era demokrasi saat ini. Partisipasi publik dalam kebijakan publik juga telah menjadi perhatian dunia. Maraknya *good governance* sebagai salah satu perhatian dalam penyelenggaraan kebijakan suatu negara dapat dijadikan sebuah pertanda. Istilah *governance* mengacu pada mekanisme dimana masyarakat dapat mengontrol ekonomi, dan sumber daya sosial dan politik rakyat, bukan bagi pembangunan saja tetapi juga untuk kohesi sosial, integrasi, dan kesejahteraan (Anggara, 2014, hlm. 317).

Antara kebijakan pemerintah kota dan pemerintah federah harus sinkron dan saling beriringan; Keterkaitan antara keduanya akan mendorong penyelarasan regulasi dan memudahkan masyarakat dalam memahami kebijakan pemerintah (Gandara, 2013, hlm. 71). Setiap kebijakan pemerintah kota mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang diselenggarakan setelah otonomi daerah oleh

Leli Mulyatika, 2022

IMPLEMENTASI PROGRAM KANG PISMAN DALAM MEMBANGUN KEPEDULIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKAMISKIN-KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah kota dengan Peraturan Daerah (Perda) yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat perkotaan.

Pembangunan harus berlangsung dan diarahkan pada terciptanya kota yang berwawasan ekonomi dan berwawasan lingkungan (Keraf, 2010, hlm. 36). Akibat peningkatan jumlah penduduk Kota Bandung, tekanan sosial, ekonomi, dan budaya mengakibatkan peningkatan jumlah sampah yang cukup besar, sehingga memerlukan penerapan strategi pengelolaan sampah yang kontemporer, ramah lingkungan, dan berprinsip kebermanfaatan.

Pola pengelolaan sampah di Indonesia yang meliputi pembuatan Bank Sampah, daur ulang, dan pengomposan sampah organik merupakan salah satu contoh penerapan ekosentris yang bentuknya tidak hanya mempertimbangkan dampak pencemaran terhadap manusia, tetapi juga dampak pencemaran terhadap ekosistem berdasarkan kehidupan secara menyeluruh (Mahyudin, 2017, hlm. 66). Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota Bandung memiliki regulasi tersendiri dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada, yaitu dengan mengeluarkannya program *Kang Pisman* yang dicanangkan pada tahun 2018. Namun, saat ini masih belum ada peraturan ataupun regulasi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang mampu mengatasi permasalahan sampah secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah sampah yang tidak terkelola lebih banyak daripada jumlah sampah yang berhasil di daur ulang, salah satu dampaknya dapat kita rasakan dari beberapa bencana yang disebabkan oleh sampah.

Analisis mengenai kebijakan pemerintah kota dalam hal ini kebijakan pengelolaan sampah merupakan salah satu kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Gandara, 2018, hlm. 47). Karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan topik yang tercakup dalam kelas kebijakan publik, maka warga negara harus memiliki kesadaran dalam menunaikan hak dan kewajibannya, salah satunya adalah dengan partisipasi kebijakan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya menjadi masyarakat yang baik adalah agar masyarakat paham atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sudah sepantasnya regulasi tersebut mampu menjawab persoalan serta permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, tidak terkecuali berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah

daerah, pelaku ekonomi, dan rakyat mendukungnya. Namun akan jauh lebih baik jika selain berupaya menjawab keadaan serta tantangan saat ini, aturan tersebut dapat mempertimbangkan kemampuan atau kepraktisan dalam pelaksanaannya.

Aristoteles menerangkan “Warga negara yang bertanggungjawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keunggulan dan keutamaan sebagai warga negara” (dalam Nurmalina and Syaifullah, 2008, hlm. 45). Warga negara yang bertanggungjawab (*civic responsibility*), menurut Nurmalina dan Syaifullah, adalah warga negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya Nurmalina dan Syaifulah (2008, hlm. 50) menyebutkan berkenaan dengan macam-macam tanggungjawab (*civic responsibility*):

- a. Tanggungjawab warga negara atas keluarganya
- b. Tanggungjawab warga negara dengan masyarakat
- c. Tanggungjawab warga negara bagi lingkungannya
- d. Tanggungjawab warga negara kepada Bangsa dan Negara
- e. Tanggungjawab warga negara terhadap Tuhan dan agamanya

Salah satu indikator tanggungjawab seorang warga negara adalah tanggungjawab warga negara bagi lingkungannya. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan ialah memahami dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan sampah. “Segala sesuatu yang ada di alam sekitar, baik yang berupa makhluk hidup, benda mati, benda nyata maupun benda abstrak, termasuk manusia lain, serta suasana yang ditimbulkan oleh interaksi komponen-komponen di alam yakni dinamakan lingkungan” (Effendi and Malihah, 2007, hlm. 111). Selanjutnya, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Lingkungan hidup merupakan suatu tempat tunggal yang memuat segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan”.

Tujuan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, menurut pernyataan tersebut, adalah untuk menciptakan masukan dan pandangan yang relevan dari individu dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Edorita, 2015, hlm. 53).

Setiap warga negara mempunyai beban tugas yang berat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, yang antara lain dapat ditunjukkan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan;
- b. Mengingat keterbatasan sumber daya alam saat ini, jangan terlalu mengeksplor alam;
- c. untuk memastikan kebersihan dan keindahan lingkungan tetap terjaga (Nurmalina and Syaifullah, 2008, hlm. 57).

Penelitian ini dimaksud untuk dapat menghasilkan data mengenai implementasi program *Kang Pisman* yang dilaksanakan oleh pemerintahan kota Bandung, serta dapat menghasilkan jawaban terhadap penanganan permasalahan sampah khususnya di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya. Lebih lanjut, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam mengevaluasi program *Kang Pisman* yang boleh jadi apabila program ini terlaksana dengan baik, nantinya dapat diterapkan diberbagai daerah dalam penanganan permasalahan sampah. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kebijakan publik, *civic responsibility* serta *civic dispotiton* masyarakat.

Berdasarkan pandangan sebelumnya tentang kebijakan, terlihat bahwa kebijakan dibuat untuk menjawab tantangan masyarakat. Subyek yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah kota Bandung yang semakin hari semakin sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu hingga hilir agar lingkungan tetap terjaga, sehat, aman, dan nyaman bagi warga, khususnya warga Kota Bandung.

Dalam Bab X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat hak,

kewajiban, dan larangan. Paragraf pertama dan kedua Pasal 65 ditulis sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari hak asasinya, setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.
2. Untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak atas pendidikan, pengetahuan, partisipasi, dan keadilan lingkungan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan: “Pemerintah diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan, pembinaan, dan penelitian lingkungan hidup”.

Berikut ciri-ciri warga negara yang baik:

1. Kemahiran untuk memahami dan menghadapi tantangan sebagai warga dunia;
2. Keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang lain dan bertanggungjawab atas peran atau tanggungjawabnya dalam masyarakat;
3. Kesanggupan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya;
4. Penguasaan berpikir kritis dan metodis;
5. Kesiediaan untuk menyelesaikan masalah melalui cara-cara non-kekerasan;
6. Kesiediaan untuk menyesuaikan gaya hidup dan pola makan utama yang ada untuk menjaga lingkungan;
7. Menunjukkan kepekaan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia (misalnya hak-hak perempuan, etnis minoritas, dll)
8. Kesiediaan dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Cogan and Derricott, 1998)

Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kurikulum yang ditujukan untuk mendidik masyarakat dalam manajemen krisis berkaitan erat dengan pertumbuhan sifat-sifat warga negara yang disampaikan. Warga negara harus

memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin sulit yang akan mereka hadapi di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian terhadap **IMPLEMENTASI PROGRAM KANG PISMAN DALAM MEMBANGUN KEPEDULIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA (Studi Kasus di Kelurahan Sukamiskin-Kota Bandung)**,). Peneliti percaya bahwa masalah ini layak diselidiki untuk menyelami faktor-faktor penyebab dan memberikan solusi dalam implementasi program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini fokus masalah penelitian secara umum yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program *Kang Pisman* dalam Membangun Kepedulian Lingkungan Masyarakat sebagai Wujud Tanggungjawab Warga Negara”. Selanjutnya agar indentifikasi masalah sesuai dengan inti permasalahan, maka penulis akan menjabarkan masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara?
2. Bagaimana hasil dari program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dari penelitian analisis tingkat efektivitas program *Kang Pisman* sebagai solusi dalam pengurangan penumpukan sampah di Sukamiskin, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara di Kecamatan Sukamiskin Kota Bandung.

2. Mendeskripsikan hasil dari program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara di Kecamatan Sukamiskin Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan kendala dan upaya dalam pelaksanaan program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara di Kecamatan Sukamiskin Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan penjabaran dari manfaat teoritis dan praktis yang ada dalam penelitian:

1.4.1 Secara teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kajian tentang kewarganegaraan khususnya bidang ekologi kewarganegaraan yang berfokus pada peran serta warga negara dalam melestarikan lingkungan.

1.4.2 Secara praktis

1.4.2.1 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian ilmu kewarganegaraan yang berfokus pada ekologi kewarganegaraan untuk mewujudkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda.

1.4.2.2 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat kelurahan Sukamiskin dalam mengevaluasi pelaksanaan program *Kang Pisman* agar masyarakat dapat memahami peran serta sebagai warga negara yang memiliki kesadaran mencintai lingkungan.

1.4.2.3 Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Bandung dalam mengevaluasi pelaksanaan program *Kang Pisman* sebagai sarana pengurangan penumpukan sampah di kota Bandung. Serta menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah lain untuk menciptakan program serupa guna meningkatkan kesadaran mencintai lingkungan warga negara.

1.4.2.4 Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi laboratorium mahasiswa dan masyarakat. Agar mahasiswa bisa secara langsung mengaktualisasikan ilmu yang didapatkannya kepada masyarakat serta memperkuat pengembangan kajian ekologi kewarganegaraannya. Selain itu, diharapkan riset dan program perguruan tinggi bisa mendukung program pengurangan penumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam susunan penulisan skripsi ini terdapat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustakan dan daftar lampiran. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka. Penulis membahas data dan teori yang berhubungan dengan topik penelitian dalam bab ini.

BAB III: Metodologi Penelitian. Penulis menguraikan metodologi penelitian dan strategi pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan program dalam bab ini.

BAB IV: Analisis Data. Dalam bab ini dijabarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang didapatkan dari data di lapangan tepatnya di kelurahan Sukamiskin kota Bandung mengenai implementasi program *Kang Pisman* dalam membangun kepedulian lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab warga negara.

BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang dilakukan dan merekomendasikan beberapa hal dari hasil penelitian yang dilakukan.